



Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah

Mohammad Fauzan¹⁾, Agung Nusantara²⁾, Sri Nawatmi³⁾, dan Agus Budi Santosa⁴⁾

Program Pascasarjana, Universitas Stikubank Semarang^{1,2}
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang^{3,4}
Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang, Indonesia 50233

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima:

16 Desember 2019

Disetujui:

24 Februari 2020

Abstract

The Human Development Index (HDI) is an internationally recognized measure of importance to describe the success of human development. Therefore, the development of HDI needs to get an important spotlight in determining development policy. One important dimension of HDI is education, as measured by Expected Years of Schooling (EYS) and Mean Years of Schooling (MYS). The EYS figure illustrates people's expectations for continuing education by basing themselves on government-made education policies. While MYS describes the reality of the old school that can be enjoyed by the community. Central Java indicates that the EYS is larger than the MYS but with a narrowing distance. This fact illustrates that education policy in Central Java is increasingly accessible to the public. However, nationally the level of education in Central Java is still low. Some factors that cause is still high dropout rate at age 16-18 year.

Abstrak

Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran penting yang diakui secara internasional untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan manusia. Oleh karena itu, pengembangan IPM perlu mendapatkan sorotan penting dalam menentukan kebijakan pembangunan. Satu dimensi penting IPM adalah pendidikan, yang diukur dengan Expected Years of Schooling (EYS) dan Mean Years of Schooling (MYS). Angka EYS menggambarkan harapan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan dengan mendasarkan diri pada kebijakan pendidikan buatan pemerintah. Sedangkan MYS menggambarkan realitas sekolah lama yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jawa Tengah menunjukkan bahwa EYS lebih besar dari MYS tetapi dengan jarak yang menyempit. Fakta ini menggambarkan bahwa kebijakan pendidikan di Jawa Tengah semakin dapat diakses oleh publik. Namun, secara nasional tingkat pendidikan di Jawa Tengah masih rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya angka putus sekolah pada usia 16-18 tahun.

Keywords:

*human development index,
expected years of schooling,
mean years of schooling*

✉ **Corresponding Author:**

Mohammad Fauzan

E-mail:

fauzan@edu.unisbank.ac.id

ISSN (print): 1412-3126

ISSN (online): 2655-3066

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia yang bersifat holistik, memandang rancangan program pembangunan harus bercirikan: Tentang, Untuk dan Oleh Penduduk. Pengertian Tentang Penduduk yaitu, pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui investasi bidang-bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial dasar lain. Pengertian Untuk Penduduk yaitu, pemberdayaan penduduk yang diupayakan melalui program penciptaan peluang bekerja dan memperluas peluang dengan cara memperluas kegiatan ekonomi suatu wilayah. Sedangkan pengertian Oleh Penduduk, pemberdayaan penduduk yang dapat meningkatkan harkat dan martabat melalui peningkatan partisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan proses pembangunan.

Di era persaingan global, tenaga terdidik juga akan menghadapi persaingan, menghadapi standardisasi kompetensi, penghilangan diskriminasi. Dalam konteks tersebut ada tiga hal krusial yang bertautan, yaitu; pertama, Indonesia bersaing dengan masyarakat Internasional. Kedua, persaingan pengaruh dan kewenangan. Ketiga, untuk memenangkannya perlu sumber daya manusia yang berkualitas. Ketiga hal tersebut

berdampak langsung pada pendidikan nasional, termasuk Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 memiliki capaian IPM sebesar 69,98 di bawah rata-rata nasional sebesar 70.18 (kategori sedang). Jawa Tengah berada di posisi ke-13 secara nasional. Jika angka IPM dicermati per-dimensi, posisi Jawa Tengah terburuk ada pada dimensi pendidikan. Dimensi pendidikan untuk ukuran Harapan Lama Sekolah

Rata-rata capaian IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 70,06 (BPS Provinsi Jawa Tengah) sedangkan nilai IPM Provinsi sebesar 69,49. Artinya capaian target IPM Kabupaten/Kota sejalan dengan capaian target IPM Provinsi. Namun masih terdapat capaian IPM Kabupaten/Kota di bawah capaian IPM Provinsi, sebanyak 18 Kabupaten dengan rata-rata capaian IPM 66,63. Artinya, terdapat kendala dan persoalan dalam pembangunan di Jateng yang seharusnya menyeluruh dan seimbang untuk semua daerah/lapisan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan RPJMD Perubahan tahun 2013-2018, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1: Perbandingan IPM Jawa Tengah 2016

	Peringkat Nasional	Peringkat di Jawa	Keterangan
IPM	13	5	Di atas Jawa Timur
Angka Harapan Hidup	2	2	Di bawah DIY
Harapan Lama Sekolah	24	5	Di atas Jawa Barat
Rata-Rata Lama Sekolah	27	6	Terbawah di Jawa
Pengeluaran	13	4	Di atas Jawa Barat

Sumber: BPS, 2017. Indeks Pembangunan Manusia, 2016

Tabel 2: Indikator Kinerja Pembangunan: Realisasi dan Target

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	REALISASI		TARGET		
	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,78	69,49	70,17	70,87	71,59
Angka Harapan Hidup (AHH)	73,88	73,96	74,46	74,75	75,05
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,17	12,38	12,75	13,05	13,35
Rata-Rata Lama Sekolah	6,93	7,03	7,04	7,09	7,15
Tingkat Pengeluaran Per kapita disesuaikan (Rp.000/tahun)	9.639,74	9.930	9.981,33	10.156,50	10.334,75

Sumber: RPJMD 2017-2018

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah dengan kualitas manusia yang tinggi, pemerintah daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di sektor-sektor yang mendukung pembangunan manusia. Lebih spesifiknya pemerintah daerah harus bisa mengalokasikan belanja daerah melalui pengeluaran pembangunan di sektor-sektor pendukung untuk meningkatkan IPM misalnya yang tercermin pada realisasi belanja daerah untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Selain dari sisi anggaran, faktor kondisi sosial ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi IPM, artinya apabila jumlah penduduk miskin di suatu daerah tinggi maka akan menurunkan IPM. Hal ini terjadi karena penduduk yang miskin mempunyai keterbatasan dalam mengakses kebutuhan mereka termasuk dalam memenuhi kebutuhan dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang implikasinya akan dapat menurunkan IPM.

Berdasarkan data di atas, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dibanding Provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, posisi Provinsi Jawa Tengah tergolong masih rendah dari capaian indikator kinerja pembangunan mencakup Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Tingkat Pengeluaran Perkapita. Untuk itu, perlu diidentifikasi permasalahan yang terjadi dan faktor yang dapat dianggap sebagai pemicu untuk pertumbuhan IPM dimensi pendidikan.

KERANGKA PEMIKIRAN

IPM merupakan refleksi capaian pembangunan manusia secara luas, IPM sebagai indikator cara pandang sisi lain dari pembangunan, tidak hanya mengukur capaian materi (ekonomi) jangka pendek akan tetapi melihat capaian membangun kualitas hidup manusia yang diukur dengan tiga aspek kehidupan dasar, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kelayakan hidup (ekonomi). IPM disusun secara hirarkhis tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota sehingga memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antar daerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat

terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk.

IPM merupakan informasi tentang anggaran dan program kegiatan yang dilaksanakan secara efektif, dengan demikian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi penyusun kebijakan pembangunan. Bagi pemerintah, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja, IPM dapat juga digunakan sebagai salah satu cara untuk memonitor wilayah yang membutuhkan perhatian atau mendorong agar dapat mencapai target pembangunan yang ditetapkan, dengan kata lain, IPM dapat digunakan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan

Model pengukuran pembangunan manusia, idealnya mencakup banyak variabel, mengingat manusia merupakan makhluk multi-dimensional. Ilmu pengetahuan mengajarkan untuk menggunakan variable yang minimal namun mampu memberikan gambaran yang memadai (prinsip parsimony). Sehingga, terlalu banyak variabel akan memberikan gambaran yang bukan hanya membingungkan namun juga tidak efisien. Isu ini menjadi perhatian penting dalam pengukuran pembangunan manusia.

Pengukuran mengenai pembangunan manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan ide baru tentang pengukuran pembangunan manusia yang disebut Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada dasarnya pembangunan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa kecuali. Ukuran kesejahteraan dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan gambaran tentang hasil pembangunan yang bukan sekedar pertimbangan materi (ekonomi) tapi lebih

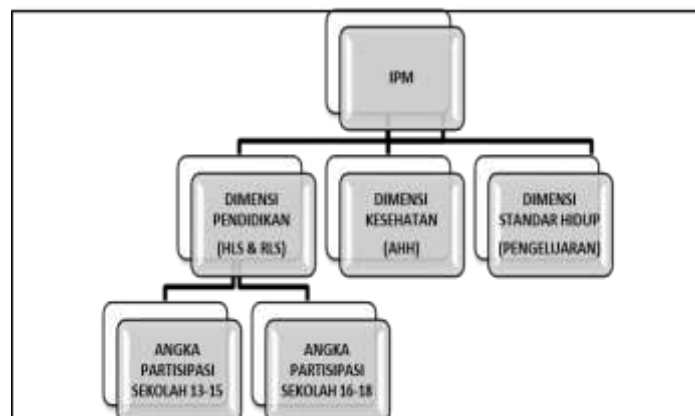
mendasar lagi yaitu ukuran tentang kualitas hidup manusia. IPM mempertimbangkan tiga aspek penting dalam ukuran kualitas hidup manusia, yaitu: usia harapan hidup (*longevity*), tingkat pendidikan (*knowledge*), dan standar kehidupan layak (*decent living*). Besaran komposit tersebut merupakan besaran yang dianggap representative bagi ukuran tentang kualitas hidup manusia. Dalam kajian ini lebih difokuskan pada dimensi tingkat pendidikan.

Untuk mengukur tingkat pendidikan digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan lama Sekolah (HLS). Rata-rata lama sekolah (*mean years schooling*) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan penduduk, makin lama mengikuti pendidikan formal diharapkan makin tinggi tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki. HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan diberbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Pada bagian ini akan dilakukan proses penghitungan dengan tujuan mengidentifikasi variable control yang efektif untuk mengidentifikasi komponen IPM, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk dimensi Pendidikan. Proses perhitungan diawali dengan mencermati definisi dari komponen IPM dan mencari faktor yang relevan dikaitkan dengan dimensi tersebut. Penentuan faktor didasarkan atas rumusan indikator dan teori yang mengkaitkan indikator tersebut dengan faktor-faktor tertentu serta dilakukan uji coba

untuk menentukan inti pembentuk dimensi IPM



Gambar 1: Faktor-Faktor Pembentuk Dimensi IPM Dimensi Pendidikan

Selanjutnya, proses penghitungan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

Langkah pertama: data dasar yang merupakan ukuran komponen IPM ditempatkan sebagai variable yang dikontrol (*controlled variable*), yaitu: HLS dan RLS. Sedangkan variable control (*control variable*) di tentukan berdasarkan rumusan dan teori, yaitu: Dimensi Pendidikan (HLS, RLS): Angka Partisipasi Kasar (APK); Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Langkah kedua: adalah menerapkan model estimasi Panel dengan pertimbangan model prediksi membutuhkan data yang banyak. Sehingga pilihan data panel adalah pilihan yang paling relevan. Data panel melibatkan 35 kabupaten/kota sebagai *cross-section*-nya, dan periode 2010-2016. Sebagai catatan: periode sampel 52end berbeda untuk tiap model perhitungan. Model Panel yang dijadikan alternative adalah: Pool Ordinary Least Square (POLS); Fixed Effect Model

(FEM); dan Random Effect Model (REM).

Langkah ketiga: memilih model terbaik dari tiga alternatif model yang digunakan melalui pengujian *Redundant Fixed Effect* yang berbasis *Chow Test*, untuk menentukan POLS atau FEM yang lebih baik, serta Hausman Test untuk memilih FEM atau REM yang lebih baik

Langkah ke-empat: setelah menghasilkan model terpilih maka dapat dilakukan simulasi hubungan antara variable control dan variable yang dikontrol.

kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Capaian IPM Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 69,98. Capaian tersebut berada pada peringkat 13 dari 34 provinsi di Indonesia termasuk kelompok berstatus sedang. Selama periode 2010 sampai 2016 tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,98 persen per tahun. Sementara itu, pada periode 2015-2016 IPM Jawa Tengah meningkat 0,49 poin. Peningkatannya lebih rendah dibandingkan dengan periode 2014-2015 yang naik sebesar 0,71 poin. Capaian IPM Jawa Tengah masih lebih rendah dibanding nilai IPM nasional 70,18 dan lebih rendah pula pendidikan beberapa provinsi lain yang statusnya telah mencapai IPM tinggi yakni Riau, Kepulauan Riau, DKI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Capaian IPM Jawa Tengah relatif setara dengan pertumbuhan Jawa Barat dan relatif lebih tinggi dari Jawa Timur.

KINERJA IPM DIMENSI PENDIDIKAN JAWA TENGAH

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan jangka panjang dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Untuk melihat

Tabel 3: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah Menurut Komponen, 2010- 2016

Komponen (1)	Satuan (2)	2010 (3)	2011 (4)	2012 (5)	2013 (6)	2014 (7)	2015 (8)	2016 (9)
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	72,73	72,91	73,09	73,28	73,88	73,96	74,02
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	11,09	11,18	11,39	11,89	12,17	12,38	12,45
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,71	6,74	6,77	6,80	6,93	7,03	7,15
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp 000	8.992	9.296	9.497	9.618	9.640	9.930	10.153
IPM		66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49	69,98
Pertumbuhan IPM		%	0,84	0,86	1,21	1,12	1,04	0,71

Sumber: BPS, 2016. Indeks Pembangunan Manusia 2016.

Tabel 4 : Status Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Tengah 2016

NO	STATUS	JUMLAH KAB/KOTA		KABUPATEN/KOTA	
		2015	2016	2015	2016
1	Sangat Tinggi > 80	3	3	Kota: Surakarta; kota Salatiga; kota Semarang	Kota: Surakarta; Salatiga; Semarang
2	Tinggi 70 - 80	12	15	Kabupaten: Purworejo, Boyolali; Klaten; Sukoharjo; Karanganyar; Sragen; Kudus; Jepara; Semarang	Kabupaten: Banyumas, Purworejo, Boyolali; Klaten; Sukoharjo; Karanganyar; Sragen; Kudus; Jepara; Demak; Semarang; Kendal
3	Sedang 60 - 70	20	17	Kota Pekalongan; kota Tegal Kabupaten: Cilacap; Banyumas; Purbalingga; Banjarnegara; Kebumen; Wonosobo; Magelang; Wonogiri; Grobogan; Blora; Rembang; Pati; Demak; Temanggung; Kendal; Batang; Pekalongan; Pemalang; Tegal; Brebes;	Kota: Magelang; Pekalongan; Tegal Kabupaten: Cilacap; Purbalingga; Banjarnegara; Kebumen; Wonosobo; Magelang; Wonogiri; Grobogan; Blora; Rembang; Pati; Temanggung; Batang; Pekalongan; Pemalang; Tegal; Brebes;
4	Rendah < 60	-	-	Tidak ada kota yang masuk dalam kategori ini -	

Capaian IPM provinsi Jawa Tengah tidak dapat dilepaskan dari capaian IPM Kabupaten/Kota. Pada Tabel 4 nampak bahwa capaian IPM Kabupaten Kota yang memiliki nilai di atas nilai IPM nasional hanya 18 kabupaten/Kota yang terdiri dari 6 kota dan 12 kabupaten. Sedangkan 17 kabupaten lain berada pada status IPM sedang (skor IPM 60-70). Namun demikian dilihat dari tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk dalam status tinggi dari sebelumnya sedang, yaitu: Demak, Kendal dan Banyumas.

Dimensi pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2010 HLS sebesar 11,09 kemudian meningkat menjadi 12,45 pada tahun 2016, sedangkan HRS pada tahun 2010 6,71 kemudian meningkat menjadi 7,15 pada tahun 2016. Dengan demikian Selama periode 2010 - 2016, Harapan Lama Sekolah di Jawa Tengah telah meningkat sebesar 1,36 tahun, dan HLS secara rata-rata tumbuh sebesar 2,04 persen per tahun. Selain HLS dan RLS, Angka Partisipasi Sekolah juga terus mengalami peningkatan, pada tahun 2010 APS untuk 13-15 tahun 85,33 meningkat menjadi 95,41, sedangkan APS 16-18 tahun pada tahun 2010 sebesar 53,72 kemudian pada tahun 2016

menjadi 67,95. Dengan demikian selama periode 2010-2016, APS 13-15 tahun meningkat 10,08, APS16-18 tahun meningkat 14,23.

Hasil identifikasi peran Angka Partisipasi Sekolah di usia 13-15 tahun dan usia 16 - 18 tahun menunjukkan bahwa peran APS untuk kedua usia tersebut penting, namun peran APS usia 16- 18 tahun lebih rendah daripada APS 13-15 tahun. Hal ini dapat dilihat pada hasil identifikasi berikut ini:

Identifikasi komponen IPM dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), menggunakan dua variable control, yaitu: Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 13-15 tahun (APS1315) dan Angka Partisipasi Sekolah untuk usia 16-18 tahun (APS1618). Dasar pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan variable tersebut adalah keselarasan definisi. Angka Partisipasi Sekolah di definisikan sebagai proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat

dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

$$APS_i = \frac{POP_i \text{ yang masih sekolah}}{POP_i} * 100\%$$

Keterangan:

APSi = Angka Partisipasi Sekolah untuk usia-I (13-15 dan 16-18)

POPi = jumlah penduduk usia-I (13-15 tahun dan 16-18 tahun)

Analisis pertama diterapkan terhadap dimensi pendidikan (RLS dan HLS) dengan metode panel regression yang meliputi 35 kabupaten dan kota dengan periode amatan 2010-2016. Dengan membandingkan ketiga model alternative yang digunakan dapat

disimpulkan bahwa model Fixed Effect merupakan model yang terbaik (Tabel 5).

Dengan demikian indikator APS₁₃₁₅ dan APS₁₆₁₈ layak untuk dijadikan variable control terhadap HLS dan RLS. Persamaan yang terbentuk, baik model HLS ataupun model RLS, memiliki koefisien yang sama, namun berbeda di nilai konstanta.

Jika dilihat perkembangan dua tahun terakhir HLS Jawa Tengah sebesar 12,38 (2015) dan mengalami peningkatan menjadi 12.45 (2016). Hal ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,45 tahun, atau setara menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Peningkatan nilai HLS menjadi sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah.

Tabel 5: Pengujian Model Alternativ

	POLS	FIXED EFFECT	RANDOM EFFECT
	Model 1: HLS = f (APS ₁₃₁₅ , APS ₁₆₁₈)		
REDUNDANT FIXED EFFECT	Cross Section F Prob=0.000		
HAUSSMAN TEST	Cross Section Random Prob (0.000)		
	Model 2: RLS = f (APS ₁₃₁₅ , APS ₁₆₁₈)		
REDUNDANT FIXED EFFECT	Cross Section F Prob=0.000		
HAUSSMAN TEST	Cross Section Random Prob (0.000)		

Model Umum estimasi:

Model HLS:

$$HLS_{it} = 4.448 + 0.062 APS_{1315(it)} + 0.028 APS_{1618(it)}$$

Model RLS:

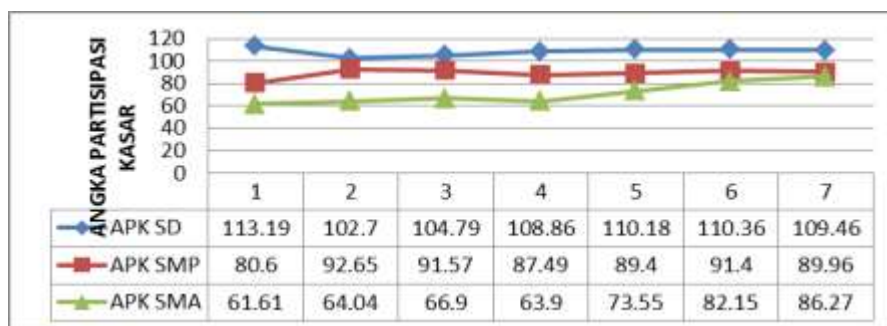
$$RLS_{it} = 3.585 + 0.029 APS_{1315(it)} + 0.013 APS_{1618(it)}$$

Gambar 2 : Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata :Lama Sekolah



Sumber : BPS Jateng

Gambar 3 : Angka Partisipasi Kasar (2010-2016)



Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2016

Rendahnya capaian HLS provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh daya beli masyarakat, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan investasi manusia terhadap anaknya. Hal ini terlihat masih tingginya anak putus sekolah dan masih rendahnya minat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Di Jawa Tengah siswa putus sekolah dari berapa jenjang pendidikan dasar dan menengah Tahun 2016/2017 yaitu jenjang pendidikan SD sebanyak 2.205, SMP sebanyak 3.673, SMA sebanyak 2.618, SMK sebanyak 10.867. Selain itu terdapat angka melanjutkan dari jenjang SD ke SMP sebesar 80,04 % dan angka melanjutkan dari jenjang SMP ke SM sebesar 99,65 %. Selain itu, dipengaruhi pula persepsi orangtua/keluarga melihat pentingnya makna pendidikan sebagai investasi manusia, Semakin tinggi persepsi orang tua terhadap pentingnya pendidikan maka semakin tinggi dana investasi manusia

(biaya sekolah) yang dialokasikan orang tua terhadap pembiayaan sekolah anaknya.

Sementara itu, selama periode 2010 - 2016 RLS di Jawa Tengah rata-rata tumbuh 1,09 persen per tahun. Jika dilihat perkembangan pada dua tahun terakhir RLS Jawa Tengah sebesar 7,03 (2015) meningkat menjadi 7,15 (2016). Capaian indikator RLS Jawa Tengah melampaui capaian yang ditargetkan dalam RPJMD 2016 sebesar 7,04. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Jawa Tengah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Pertumbuhan positif RLS mengindikasikan adanya pembangunan kualitas manusia di Jawa Tengah menjadi lebih baik. Namun demikian, jika dibanding dengan kondisi ideal RLS sebesar 15 tahun masih sangat jauh. Pertumbuhan moderat dari RLS Jawa Tengah ini berkorelasi dengan Angka



Gambar 4: Angka Partisipasi Sekolah

Sumber: BPS, Jawa Tengah, 2016

Partisipasi Kasar (APK), adanya anak putus sekolah, dan rendahnya daya beli (pendapatan) kelompok masyarakat tertentu.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 dan 2016 pada semua jenjang pendidikan

mengalami peningkatan. APK SD/MI, dari 113,19 turun menjadi 109,46. APK SMP/MTs meningkat dari 80,60 menjadi 89,96 APK SMA/SMK/MA meningkat dari 61,61 menjadi 86,27, (lihat gambar 3) . Selain itu, di Jawa

Tengah masih terdapat siswa putus sekolah dari berapa jenjang pendidikan dasar dan menengah Tahun 2016/2017 yaitu jenjang pendidikan SD sebanyak 2.205, SMP sebanyak 3.673, SMA sebanyak 2.618, SMK sebanyak 10.867 Selain itu terdapat angka melanjutkan dari jenjang SD ke SMP sebesar 80,04 % dan angka melanjutkan dari jenjang SMP ke Sekolah Menengah sebesar 99,65 . siswa putus sekolah di masing-masing jenjang pendidikan bisa terdeteksi dari APS sebagaimana terlihat dalam gambar grafik 4.5. di bawah . Nilai APS usia 7-12 memiliki nilai paling tinggi, kemudian usia APS 13-15 tahun terletak di tengah dan APS usia 16-18 tahun nilainya paling rendah. Angka Partisipasi Sekolah ini menggambarkan banyaknya siswa yang mengikuti pendidikan pada tingkat usia tertentu. Rendahnya APS usia 16-18 tahun tersebut menunjukkan banyaknya siswa yang tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Terkait dengan angka putus sekolah, hasil kajian menunjukkan bahwa APS sekolah berkorelasi ($r = - 0,46$) dengan angka kemiskinan, khususnya APS 16-18 tahun (SLTA) , hal ini mengindikasikan bahwa banyak putus sekolah ini disebabkan karena masalah kemiskinan.

KESIMPULAN

- a) Dimensi pendidikan pada IPM dibentuk oleh dua indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Indikator HLS Jawa Tengah pada tahun 2016 sebesar 12.45. Hal ini berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,45 tahun, atau setara menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Sementara itu, pada tahun 2016 nilai indikator RLS sebesar 7.15. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Jawa Tengah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II).
- b) Indikator RLS dan HLS sangat tinggi terdapat di kabupaten/kota yang struktur masyarakatnya terindikasi tumbuh suasana perkotaan dan

beberapa daerah merupakan wilayah fungsional. Suasana kota adalah yang mendorong masyarakat memiliki karakter khusus (kecenderungan kepentingan keduniawian menonjol, tumbuh lingkungan kompetitif, spesialisasi keahlian, keterbukaan peluang kerja dan usaha berbasis pengetahuan dan teknologi, individualitas dan kebebasan, kota sebagai pull factor (pusat ekonomi dan perdagangan, pendidikan, dan jasa) dan pilihan untuk melakukan investasi manusia (*human investment*) pada anaknya relatif tinggi.

- c) Wilayah kabupaten/kota yang nilai indikator HLS dan RLS tinggi berada di wilayah fungsional (*nodal region*) yakni suatu wilayah yang dicirikan adanya kegiatan yang saling berhubungan antara pusat kegiatan secara fungsional saling berhubungan dan ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan hidup penduduk di setiap wilayah.
- d) Wilayah kabupaten/kota yang nilai indikator HLS dan RLS sedang, terdapat di wilayah pegunungan (Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung, Purworejo) dan wilayah pesisir (Kendal, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Cilacap) dan daerah pertanian sawah dan tadah hujan (Gobogan, Blora, Brebes). Sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir, pegunungan dan wilayah pertanian sawah dan tadah hujan tersebut sangat tergantung dengan sumberdaya ekonomi dan ekologi di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, M.K., Beegle dan Nyamete, A. (1995). *The Impact of Female Schooling on Fertility and Contraceptive*, LSMS Working Papers 110, Washington DC, World Bank.

- Behrman, J.R., dan Wolfe, B.L. (1987). How Does Mother's Schooling Affect the Family's Health, Nutrition, Medical Care Usage and Households? *Journal of Econometrics*, Vol. 36.
- Behrman, J.R., (1990). Human Resource Led Development, *Review of Issues and Development*, New Delhi, India
- Berita Resmi Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2016. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016*
- Birdsall, N., (1993). Social Development in Economic Development, *World Bank Policy Research Working Papers*, WPS 1123, Washington DC.
- Bourguignon, F. (1995). Equity and Economic Growth: Permanent Questions and Changing Answer, *Human Development Report*, UNDP.
- Bourguignon, F., dan Morrison, C. (1990). Income Distribution, Development and Foreign Trade: A Cross-Section Analysis, *European Economic Review*, Vol. 34.
- Deraniyagala, S., (1995). Technical Change and Efficiency in Sri Lanka's Manufacturing Industry, D.Phil, Oxford.
- Grubaugh, S.G. (2015). Economic Growth in Human Development. *Applied Econometrics and International Development*. Vol. 15(2),pp. 5-16.
- Kemendikbud. (2015). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2019. Dinas Pendidikan , Pemprov Jateng. Semarang, 2015. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2018.
- Percepatan Pencapaian target IPM Pada Dimensi Pendidikan Semarang Disampaikan dalam Rakor Kajian Program/Kegiatan Untuk Mendukung Capaian target IPM Semarang 12 Juli 2017
- Psacharopoulos, G. (1984). *The Contribution of Education to Economic Growth: International Comparisons*. Cambridge, Ballinger Publisher.
- Psacharopoulos, G., 1994. Return to Investment in Education: A Global Update, *World Development*, 22 (9)
- Razmi, M.J., et.al., 2015. The Relationship between Women's Education and Human Development. *European Scientific Journal*. February, Vol.1: 177-184
- Todaro, M. and S.C. Smith 2015. *Economic Development*. Pearson Education Inc.
- United Nations Development Programme, 1990. *Human Development Report 1990*. UNDP, New York.
- United Nations Development Programme, 2015. *Human Development Report: Work for Human Development 2015*. UNDP, New York.
- United Nations Development Programme, 2016. *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. UNDP, New York.